

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu dari 38 kota dan kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Yang memiliki kewenangan atas daerahnya (otonomi daerah) sejak disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam aspek ekonomi, implementasi dari otonomi daerah merupakan lanjutan dari penerapan desentralisasi fiskal, yaitu pendelegasian kewenangan di bidang keuangan oleh pemerintah Republik Indonesia. Artinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki kewenangan yang besar untuk menciptakan sumber pendapatan daerahnya. Sumber pendapatan yang dihasilkan secara mandiri oleh pemerintah daerah akan dicatat pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan sumber pendapatan yang berasal dari dana *transfer* pemerintah provinsi akan dialokasikan ke dana perimbangan.

Nilai pada pos-pos pendapatan daerah, seperti PAD dan dana perimbangan menjadi indikator untuk menganalisa kinerja keuangan suatu pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran untuk menilai kinerja daerah berdasarkan aspek keuangan. Menurut Dhia Wenny (2012), semakin besarnya kemampuan daerah dalam memperoleh PAD akan mengurangi ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa ada kinerja pengelolaan keuangan yang baik dari pemerintah daerah.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2018

Pendapatan Asli Daerah	474.788.909.899
Pendapatan pajak daerah	287.330.000.000
Hasil retribusi daerah	45.255.023.615
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.936.093.584
Lain lain pendapatan asli daerah yang sah	137.267.792.700
Dana Perimbangan	1.420.731.992.893
Bagi hasil pajak / bukan pajak	77.929.881.893
Dana alokasi umum	973.768.511.000
Dana alokasi khusus	369.033.600.000

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2018

Berdasarkan tabel 1.1 PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto pada 2018 adalah Rp. 474.788.909.899, sedangkan dana perimbangan yang diterima mencapai Rp. 1.420.731.992.893. Hal tersebut menunjukkan bahwa proporsi PAD lebih rendah jika dibandingkan dengan dana perimbangan dari pemerintah provinsi. Hal tersebut juga menggambarkan suatu indikasi bahwa penerimaan kas pemerintahan daerah Kabupaten Mojokerto itu sangat bergantung pada bantuan keuangan (*transfer*) dari pemerintah provinsi.

Adanya indikasi ketergantungan penerimaan kas Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto pada dana *transfer* dari pemerintahan provinsi bisa disebabkan karena banyak hal. Pertama, dari segi pengelolaan aset dan sumber daya, menggambarkan pengelolaan yang kurang maksimal. Sementara dari segi kebermanfaatan dana perimbangan, kurangnya optimalisasi secara tepat dana yang teralokasi untuk peningkatan perekonomian aktif seperti pembangunan pasar, BUMDes, pemberdayaan penduduk serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Tidak seimbang proporsi PAD dan dana perimbangan mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Sementara Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto adalah daerah otonom yang memiliki tanggung jawab besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pembangunan berbagai sarana dan prasarana umum. Jika kondisi ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah, maka : (1) Kinerja pemerintah dalam menjalankan otonominya terkesan menurun; (2) Kurang adanya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber dayanya.

Keseimbangan komposisi dari dana perimbangan dan PAD menjadi sangat penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto karena adanya hubungan langsung antara komposisi sumber pendapatan terhadap belanja pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah melalui kewenangannya sebagai daerah otonom dalam pemenuhan dan pengalokasian dana untuk pembangunan sarana dan prasarana umum. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto”.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian latar belakang yang telah digambarkan. Rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah “Bagaimana evaluasi kontribusi PAD dan dana perimbangan pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang diangkat. Tujuan penelitian pada tugas akhir ini adalah “Mengetahui bagaimana evaluasi kontribusi PAD dan dana perimbangan pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto”

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai menimbulkan manfaat yang kongkrit. Manfaat penelitian pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto: (1) Sebagai evaluasi terkait kontribusi PAD dan dana perimbangan; (2) Memberikan informasi terkait rincian evaluasi pada aspek-aspek penting keuangan daerah; (3) Memberikan alternatif solusi untuk dijadikan pertimbangan.
2. Untuk STIE Perbanas Surabaya, sebagai penambah repository perpustakaan kampus.
3. Untuk Mahasiswa STIE Perbanas Surabaya dan Pembaca: (1) Sebagai referensi untuk Mahasiswa STIE Perbanas Surabaya yang sedang menyusun Tugas Akhir dengan topik sejenis; (2) Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan pembaca terkait dengan sumber pendapatan pemerintah daerah yaitu PAD dan dana perimbangan.